

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anand dan Ravallion (dalam Reyes dan Useche, 2019) menyatakan jika pembangunan dan pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan dari setiap negara. Sebelum tahun 1970-an konsep dari suatu indikator pembangunan hanya melihat dari sudut pandang ekonomi dan secara umum dapat di asumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi sama dengan peningkatan pendapatan. Tetapi tingkat pendapatan yang tinggi tidak menjamin suatu negara mendapatkan predikat negara maju. Faktor utama dari suatu pertumbuhan ekonomi yang harus setiap negara perhatikan adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat berpengaruh secara langsung terhadap kualitas hidup penduduk seperti distribusi pendapatan yang merata di setiap daerah, meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia, dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Sehingga, pertumbuhan ekonomi tidak hanya sebatas peningkatan kekayaan negara. Kemudian, walaupun pada waktu itu konsep dari pertumbuhan dibatasi hanya untuk indikator ekonomi, saat ini pembangunan yang merupakan tujuan utama dari suatu negara telah berkembang menjadi konsep multidimensi yang memasukan unsur ekonomi, sosial, politik, budaya, dan perubahan struktural (Ozturk dan Suluk 2020)

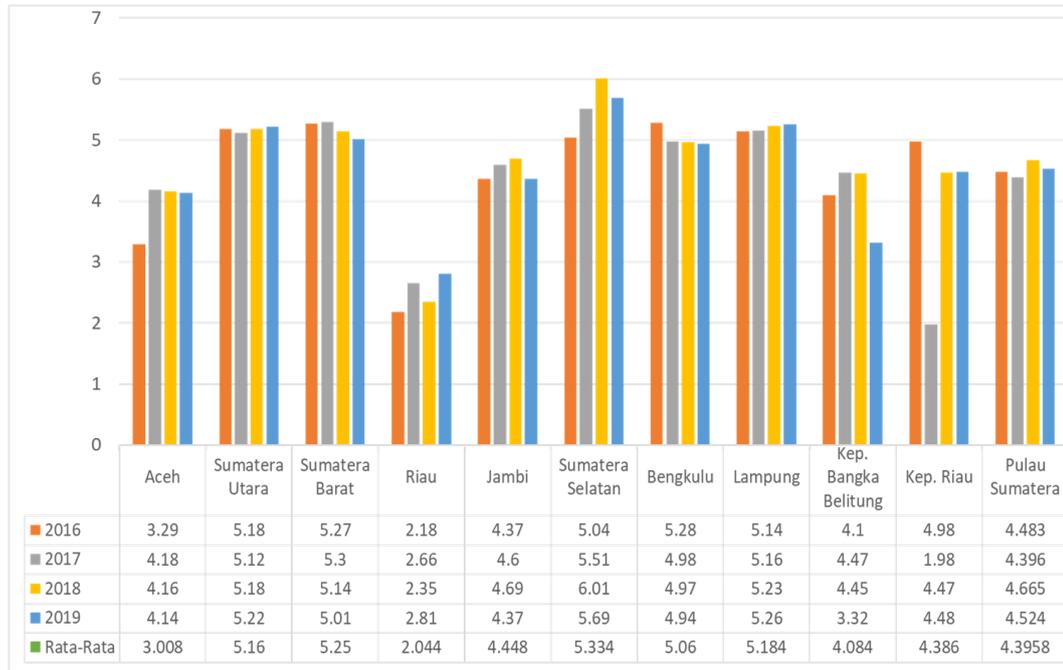
Proses pembangunan ekonomi di Indonesia diarahkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara berkeadilan. Untuk melihat pertumbuhan perekonomian di suatu daerah dapat melalui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan oleh daerah tersebut (Tambunan, 2003). Kegiatan pembangunan ekonomi di daerah tertentu merupakan bentuk dari proses pemanfaatan dan pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di daerah dan menciptakan hubungan kerjasama antara sektor pemerintah daerah dan sektor swasta untuk membuat lapangan pekerjaan sehingga menciptakan stimulus untuk pertumbuhan perekonomian pada suatu wilayah (Arsyad, 2011). Oleh karenanya, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimal disetiap daerah diterapkan kebijakan pembangunan ekonomi daerah dengan memanfaatkan dan mengembangkan seluruh potensi dan sumber daya yang ada disetiap daerah.

Dengan adanya penerapan kebijakan tersebut diharapkan dapat membuat dampak dari proses pembangunan dirasakan secara lebih adil dan merata untuk masyarakat daerah. Diperlukan perhatian yang khusus dari pihak pemerintah untuk bersikap secara berkeadilan pada semua wilayah karena di dalam proses pembangunan perekonomian daerah mempengaruhi juga tingkat kesejahteraan rakyat di daerah (Raswita dan Utama, 2013). Berdasarkan hal tersebut proses untuk menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat ke tingkat yang lebih baik lagi memerlukan pertumbuhan ekonomi yang baik juga sehingga dapat menciptakan distribusi pendapatan yang merata, meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia, dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Salah satu pulau terbesar yang ada di Indonesia adalah Pulau Sumatera dengan total luas daerah 473.481 KM² yang terbagi menjadi sepuluh provinsi yaitu: Jambi, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung. Setelah Pulau Jawa, Pulau Sumatera merupakan pulau dengan kontribusi PDRB terbesar terhadap PDB Indonesia tetapi di Pulau Sumatera juga terlihat adanya perbedaan pertumbuhan ekonomi antar provinsi, sebagaimana dapat dilihat pada data laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) antar provinsi di Pulau Sumatera dengan periode waktu 2016-2019. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan total dari *Gross Value Added*. Seluruh unsur-unsur perekonomian di suatu wilayah dan nilai tambah dari gabungan faktor-faktor produksi dan bahan baku di dalam proses produksi disebut sebagai *Value Added* (Badan Pusat Statistik, 2022).

Pada tahun 2016 Provinsi Bengkulu menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan PDRB tertinggi dengan angka pertumbuhan sebesar 5.28% dan Provinsi Riau menjadi Provinsi dengan laju pertumbuhan PDRB paling rendah pada tahun tersebut dari sepuluh Provinsi yang ada di Pulau Sumatera dengan angka pertumbuhan 2.18%. Provinsi Sumatera Selatan menjadi Provinsi dengan laju pertumbuhan PDRB tertinggi selama tiga tahun berturut yaitu pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Selama periode 2016 sampai 2019 pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera rata-rata adalah 4.3958 %.

Berikut ini Gambar 1.1. menunjukkan data laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) antar provinsi di Pulau Sumatera dengan periode waktu 2016-2019.



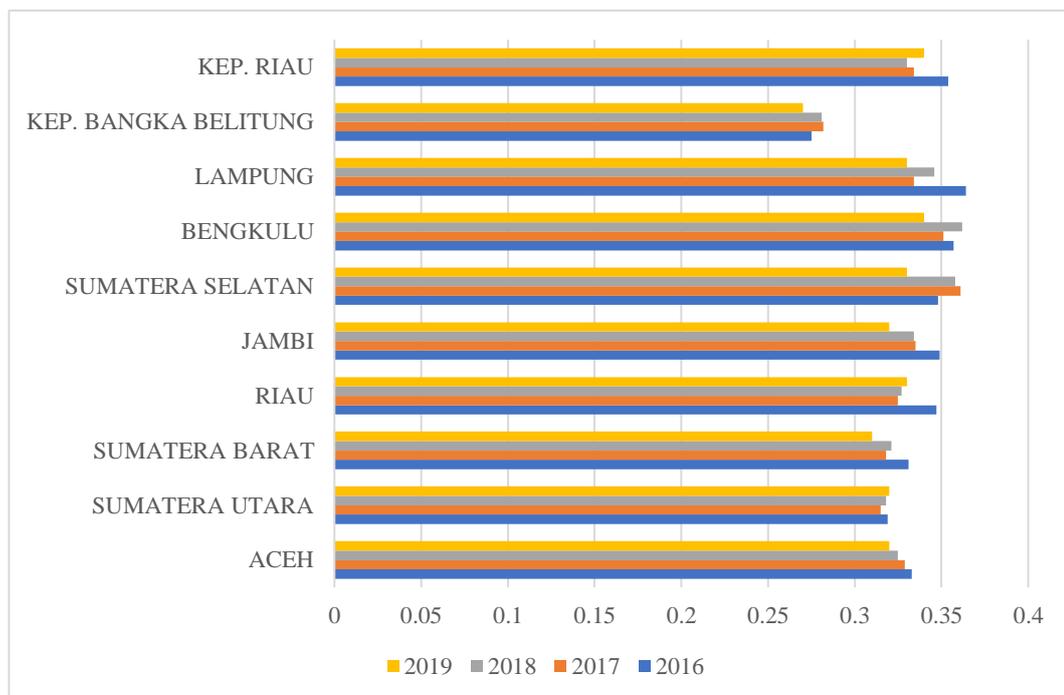
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022. Data diolah.

Gambar 1.1. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera 2016-2019 (Persen)

Selain pertumbuhan ekonomi, proses pembangunan suatu wilayah juga bergantung pada penanganan masalah ketimpangan pendapatan (*income inequality*). Seperti yang telah dijelaskan secara teoretis dan diperkuat melalui penelitian empiris, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tidak terkendali dapat berdampak menimbulkan kesenjangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan berhubungan terhadap distribusi yang tidak merata dari total pendapatan setiap penduduk suatu wilayah. Kesenjangan (*gap*) yang semakin besar antara penduduk berpendapatan tinggi dengan penduduk berpendapatan dibawahnya adalah akibat dari meningkatnya ketimpangan pendapatan. Kegiatan ekonomi di suatu wilayah terkadang ditandai dengan fenomena ketimpangan pembangunan antar wilayah. Menurut studi yang dilakukan oleh Bank Dunia (2016), Ada beberapa penyebab utama ketimpangan pendapatan di Indonesia: (i) ketimpangan kesempatan (*opportunity*), (ii) ketimpangan pekerjaan, (iii) konsentrasi kekayaan yang tinggi dan terpusat, dan (iv) tingkat ketahanan yang rendah jika terjadi perubahan-perubahan.

Karena faktor-faktor penyebab ketimpangan tersebut, potensi suatu wilayah untuk mendorong proses pembangunan menjadi berbeda-beda. Maka tidak asing lagi jika setiap wilayah memiliki wilayah yang maju dan terbelakang. Ketimpangan antar wilayah mempengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk antar wilayah. Ketimpangan antar wilayah sering kali disebabkan oleh sumber daya alam yang berbeda-beda, seperti kandungan minyak dan gas bumi, atau tingkat kesuburan tanah. Akibatnya, daerah dengan sumber daya alam yang bagus lebih efisien dalam proses produksi dan dengan biaya lebih rendah daripada daerah lain, sehingga pertumbuhan ekonomi lebih cepat terjadi.

Ketimpangan muncul dari perbedaan penyerapan sumber daya alam, penyerapan sumber daya manusia, dan teknologi. Indeks Gini merupakan salah satu cara untuk mengukur disparitas distribusi pendapatan. Indeks Gini diukur mulai dari 0 (*perfect equality*) hingga 1 (*perfect inequality*) (Todaro dan Smith, 2011). Jika suatu daerah memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi juga disparitas pendapatan yang cukup besar, ini menunjukkan bahwa sebagian besar PDRB merupakan kontribusi dari sebagian kecil masyarakat.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022. Data diolah.

Gambar 1.2. Nilai Rasio Gini Setiap Provinsi di Pulau Sumatera 2016-2019

Berdasarkan Gambar 1.2 nilai Gini Rasio pada periode waktu 2016 sampai dengan 2019. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi Provinsi dengan

ketimpangan paling rendah dari sepuluh Provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Pada tahun 2019 Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bengkulu menjadi Provinsi dengan ketimpangan paling tinggi di Pulau Sumatera dengan nilai Indeks Gini sebesar 0.34. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat jika ketimpangan pendapatan yang terjadi di Pulau Sumatera masih diatas 0.3 yang menunjukkan jika masih terjadi ketimpangan yang cukup tinggi di wilayah Pulau Sumatera.

Jika terdapat peningkatan pertumbuhan ekonomi dan taraf hidup masyarakat yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia maka suatu proses pembangunan ekonomi dapat dibilang telah berhasil dilakukan. Menurut Todaro dan Smith (2011) ada beberapa indikator yang diukur didalam IPM yaitu: 1). Kinerja sektor kesehatan diukur dengan angka harapan hidup, 2). Partisipasi sekolah, dan rata-rata lama sekolah sebagai tolak ukur kinerja pembangunan, 3). Daya beli masyarakat diukur dengan rata-rata pengeluaran per kapitanya sehingga nilai IPM berbeda-beda menurut wilayah dan menjadi salah satu variabel yang mempengaruhi terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah. Kemajuan yang dicapai akan sia-sia jika tidak meningkatkan kualitas manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di definisikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai Indeks gabungan yang mengukur pencapaian rata-rata dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia; hidup yang panjang dan sehat, pengetahuan dan standar hidup yang layak (UNDP, 2011). Berikut Tabel 1.1. memperlihatkan IPM setiap Provinsi di Pulau Sumatera periode 2016-2019.

Tabel 1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Setiap Provinsi di Pulau Sumatera 2016-2019 (Persen)

Provinsi	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Aceh	70	70.6	71.19	71.9
Sumatera Utara	70	70.57	71.18	71.74
Sumatera Barat	70.73	71.24	71.73	72.39
Riau	71.2	71.79	72.44	73
Jambi	69.62	69.99	70.65	71.26
Sumatera Selatan	68.24	68.86	69.39	70.02
Bengkulu	69.33	69.95	70.64	71.21
Lampung	67.65	68.25	69.02	69.57
Kep. Bangka Belitung	69.55	69.99	70.67	71.3
Kep. Riau	73.99	74.45	74.84	75.48

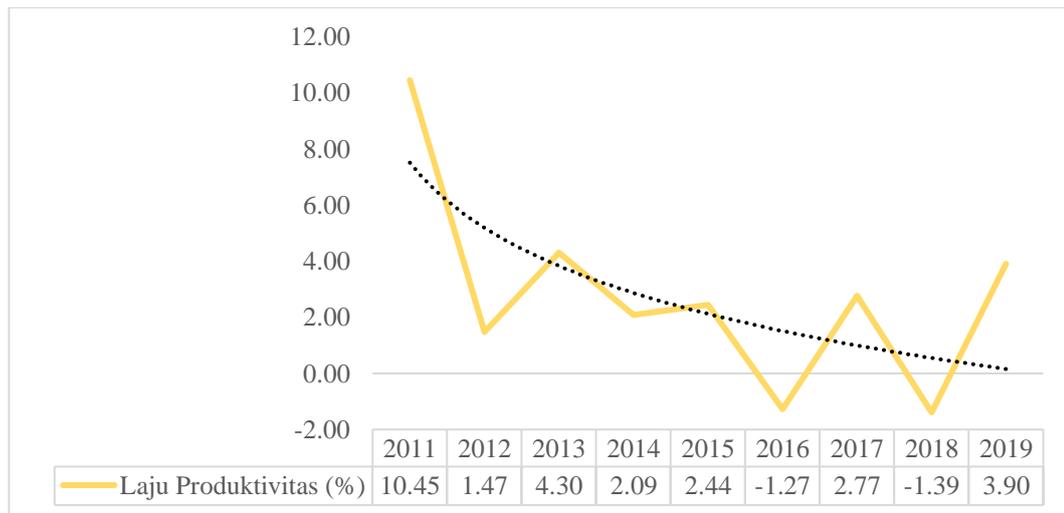
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022. Data diolah.

IPM adalah indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan pembangunan jangka panjang. Berdasarkan data pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pemerataan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau dikenal *Human Development Index* (HDI) setiap Provinsi yang ada di Pulau Sumatera mengalami tren yang positif pada periode waktu 2016 sampai dengan 2019. Pada tahun 2019 dari 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatera, 9 Provinsi berstatus sebagai Provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi dan 1 Provinsi berstatus sebagai Provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia sedang. Provinsi Kepulauan Riau memiliki IPM yang tertinggi dengan nilai 75.48 sedangkan Provinsi Lampung menjadi daerah di Pulau Sumatera dengan IPM paling rendah tahun 2019 yaitu dengan nilai 69.57%.

Salah satu sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan ekonomi suatu daerah adalah tenaga kerja yang terampil. Dengan tenaga kerja yang terampil disuatu daerah akan berpengaruh terhadap produktivitas *output* tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan perekonomian di daerah (Nurmainah, 2013). Produktivitas tenaga kerja menurut International Labour Organization (2018) merupakan gambaran dari total volume *output* (diukur dalam Produk Domestik Bruto, PDB) yang dihasilkan per unit tenaga kerja (diukur dalam jumlah orang yang dipekerjakan atau jam kerja) selama periode waktu tertentu. Indikator ini memungkinkan untuk menilai tingkat input PDB dengan tenaga kerja dan tingkat pertumbuhan dari waktu ke waktu, sehingga memberikan informasi tentang efisiensi dan kualitas tenaga kerja manusia dalam proses produksi untuk konteks ekonomi dan sosial pada wilayah tertentu.

Laju pertumbuhan produktivitas tenaga kerja menunjukkan persentase perubahan produktivitas tenaga kerja dari tahun sebelumnya. Dari gambar diatas laju pertumbuhan produktivitas tenaga kerja di Pulau Sumatera pada periode waktu 2011 sampai dengan 2019 memiliki trend yang negatif dengan nilai laju pertumbuhan produktivitas tertinggi terjadi pada tahun 2011 dengan nilai 10.45% dan nilai yang paling rendah terjadi pada tahun 2018 dengan nilai -1.39%. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat dari trend data yang negatif, tingkat produktivitas tenaga kerja di Pulau Sumatera belum optimal.

Berikut ini Gambar 1.3 menunjukkan laju pertumbuhan produktivitas tenaga kerja di Pulau Sumatera pada periode waktu 2011 sampai dengan 2019.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022. Data diolah.

Gambar 1.3. Laju Pertumbuhan Produktivitas Tenaga Kerja di Pulau Sumatera 2011-2019 (Persen)

Berdasarkan penjelasan beberapa data sebelumnya dapat dilihat pembangunan manusia di Pulau Sumatera berada pada tren yang positif, hal ini tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia pada setiap Provinsi di Pulau Sumatera. Pada tahun 2016 Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia berkategori tinggi ada 5 Provinsi yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Kepulauan Riau, untuk Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016 hanya memiliki Indeks Pembangunan Manusia berkategori sedang. Tren positif pada proses pembangunan manusia di Pulau Sumatera terlihat pada tahun 2019, yang mana Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia berkategori tinggi bertambah menjadi 9 Provinsi dari sebelumnya 5 Provinsi pada tahun 2016. Provinsi Lampung menjadi satu-satunya Provinsi di Pulau Sumatera yang pada tahun 2019 masih memiliki Indeks Pembangunan Manusia berkategori sedang.

Pendidikan merupakan langkah pertama dalam proses pembangunan ekonomi dan pendidikan memainkan peran penting dalam membangun kapasitas sumber daya manusia suatu bangsa dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Y. J. Kim dan Terada-Hagiwara, 2010). Selanjutnya tingkat produktivitas tenaga kerja erat kaitannya dengan pembangunan manusia di suatu daerah. Penyediaan fasilitas

sekolah dan pelatihan formal menunjukkan investasi dan usaha dalam proses pembangunan sumber daya manusia pada suatu daerah untuk meningkatkan tingkat produktivitas tenaga kerja. Terbentuknya tenaga kerja yang berpengalaman dan terdidik merupakan output dari proses pembangunan manusia. Tren positif pembangunan manusia di Pulau Sumatera pada periode waktu 2016 sampai dengan 2019 juga diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang berada di atas angka 4% yang mana Provinsi Sumatera Selatan selama periode waktu 2016 sampai dengan 2019 menjadi Provinsi di Pulau Sumatera dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 5.334%.

Simon Kuznets (dalam Lyubimov, 2017) menjelaskan bahwa ketika pertumbuhan ekonomi berlangsung, ketimpangan pendapatan pertama-tama meningkat dan kemudian setelah mencapai titik balik tertentu mulai menurun. Pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Pulau Sumatera tidak menjamin kemakmuran untuk semua Provinsi yang ada di Pulau Sumatera, hal ini terlihat dari masih tingginya ketimpangan pendapatan yang terjadi di Pulau Sumatera pada periode waktu 2016 sampai 2019 dengan nilai gini rasio di atas 0.3 pada setiap Provinsi di Pulau Sumatera. Tidak hanya masih terdapat ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera, angka laju produktivitas tenaga kerja di Pulau Sumatera juga tidak menggambarkan hasil dari tren positif pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia yang terjadi di Pulau Sumatera. Laju produktivitas tenaga kerja di Pulau Sumatera pada periode waktu 2011 sampai dengan 2019 berada pada tren yang menurun, yang mana pada tahun 2016 dan tahun 2018 sempat menghasilkan laju produktivitas tenaga kerja dengan nilai negatif. Secara umum, pembangunan ekonomi selain meningkatkan PDB atau PDRB juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan pemerataan pendapatan di antara masyarakat. Berdasarkan hal tersebut peneliti terdorong untuk melakukan penelitian tentang hubungan kausalitas dinamis antara ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, tingkat produktivitas tenaga kerja, dan pembangunan manusia terutama pada kawasan Pulau Sumatera dengan judul “Hubungan Dinamis Pertumbuhan Ekonomi, Pembangunan Manusia, Ketimpangan Pendapatan, dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera”.

1.2. Rumusan Masalah

Berlandaskan kepada latar belakang penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya menimbulkan beberapa permasalahan. Hal tersebut menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian terhadap hubungan jangka panjang dan jangka pendek, serta hubungan kausalitas antara variabel yang telah ditentukan sehingga rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia, tingkat produktivitas tenaga kerja dan ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera?
2. Bagaimana kontribusi variabel pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat produktivitas tenaga kerja jika terjadi *shock* pada variabel ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera?
3. Bagaimana kontribusi variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat produktivitas tenaga kerja, dan ketimpangan pendapatan jika terjadi *shock* pada variabel pembangunan manusia di Pulau Sumatera?
4. Bagaimana kontribusi variabel pembangunan manusia, tingkat produktivitas tenaga kerja, dan ketimpangan pendapatan jika terjadi *shock* pada variabel pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera?
5. Bagaimana kontribusi variabel pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan jika terjadi *shock* pada variabel tingkat produktivitas tenaga kerja di Pulau Sumatera?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat ditentukan tujuan dari penelitian, antara lain:

1. Untuk menganalisis hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia, tingkat produktivitas tenaga kerja dan ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera.
2. Untuk mengetahui kontribusi variabel pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat produktivitas tenaga kerja jika terjadi *shock* pada variabel ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera.

3. Untuk mengetahui kontribusi variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat produktivitas tenaga kerja, dan ketimpangan pendapatan jika terjadi *shock* pada variabel pembangunan manusia di Pulau Sumatera.
4. Untuk mengetahui kontribusi variabel pembangunan manusia, tingkat produktivitas tenaga kerja, dan ketimpangan pendapatan jika terjadi *shock* pada variabel pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera.
5. Untuk mengetahui kontribusi variabel pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan jika terjadi *shock* pada variabel tingkat produktivitas tenaga kerja di Pulau Sumatera.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan di atas dapat ditentukan beberapa manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Secara Akademis

Dapat memberikan informasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hubungan dinamis yang terjadi antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia, tingkat produktivitas tenaga kerja, dan ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera dan dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat membantu pembuat kebijakan, baik pusat maupun daerah, menentukan inisiatif kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya penduduk, dan produktivitas tenaga kerja, serta mengurangi disparitas pendapatan di masyarakat. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan gambaran dan rekomendasi dalam proses persiapan dan perencanaan pembangunan untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di Indonesia khususnya di Provinsi yang ada di Pulau Sumatera.